

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD berpedoman pada Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan secara melekat. Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar 1.6 Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Adapun sub tahapan verifikasi administrasi merupakan tahapan selanjutnya setelah proses pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar telah selesai dilakukan dari tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. Pihak KPU Karanganyar bertugas dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan dengan berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Pada sub tahapan tersebut, verifikator mengecek terkait dengan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon dan kegandaan pencalonan. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SILON. Tugas dari Bawaslu Karanganyar dalam menjalankan pengawasan melekat yaitu dengan ikut memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon dituangkan tiap poin instrumennya dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP). Waktu dilaksanakannya sub tahapan vermin yaitu dari tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023.

a. Kerawanan-kerawanan

Pada pelaksanaan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD, terdapat kerawanan yang dapat terjadi antara lain :

- 1) Akses SILON masih belum bisa menampilkan dokumen asli yang diunggah oleh partai politik. Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi tidak hanya secara langsung melekat di KPU Karanganyar, namun juga lewat SILON. Apabila akses SILON menampilkan informasi yang terbatas, otomatis pengawasan menjadi tidak optimal.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan kerawanan yang telah disampaikan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menyusun strategi perencanaan pengawasan. Alasan dibentuknya perencanaan tersebut salah satunya karena akses SILON yang tidak dapat menampilkan dokumen persyaratan beserta berkasnya, hanya menampilkan foto calon dan nomor urut calon

pada partai politik pengusung. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar menekankan pengawasan melekat pada saat verifikasi administrasi dan klarifikasi dokumen persyaratan. Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat imbauan terkait dengan pelaksanaan vermin dokumen persyaratan bacalon kepada KPU Kabupaten Karanganyar.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan Bawaslu Kabupaten Karanganyar difokuskan dengan mengirimkan surat imbauan ke KPU Kabupaten Karanganyar perihal verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalon. Dimana surat imbauan tersebut sejumlah dua buah. Surat pertama bernomor 200/PM.00.02/K.JT-11/05/2023 yang memuat mengenai proses verifikasi administrasi yang menekankan pada verifikator untuk melaksanakan vermin berdasarkan prosedur yang ada, meneliti kebenaran validitas dan kegandaan pencalonan yang bisa terjadi. Sedangkan pada surat kedua bernomor 207/PM.00.02/K.JT-11/05/2023, memuat tentang KPU Kabupaten Karanganyar untuk memberikan akses atau menyampaikan jadwal pelaksanaan vermin.

b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan surat imbauan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, kami memperoleh jadwal serta pembagian tim verifikator yang dilaksanakan pada 31 Mei s.d 2 Juni 2023. Kami juga membagi tim pengawasan sesuai dengan pembagian verifikator yang ada. Pada tanggal 31 Mei 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 31 Mei 2023 yaitu antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh kelompok I, Partai Gerindra dan PAN oleh kelompok II, Partai PDIP dan Partai Demokrat oleh kelompok III, Partai Golkar dan Perindo oleh kelompok IV, dan Partai Nasdem oleh kelompok V. Dimana proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dimana hasil verifikasi menunjukkan Partai PKB (1 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai Gerindra (39 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai PAN (1

berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Golkar (13 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai PDIP (22 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Demokrat (32 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Perindo (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Nasdem (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon). Ditemukan data ganda internal pada Partai PDIP pada 1 kabupaten.



Gambar 1.7 Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD pada Jumat (02/07/2023).

Pada tanggal 1 Juni 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 1 Juni 2023 yaitu antara lain Partai Keadilan Sosial (PKS) oleh kelompok I, Partai Ummat dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) oleh kelompok II, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Hanura oleh kelompok III, Partai Gelora dan Garuda oleh kelompok IV, dan Partai Bulan Bintang (PBB) oleh kelompok V. Dimana proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hasil verifikasi menunjukkan Partai PKS (1 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai Ummat (3 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 16 berkas bakal calon); Partai PKN (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 7 berkas bakal calon); Partai PSI (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 19 berkas bakal calon); Partai Hanura (1 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 3 berkas bakal calon); Partai Gelora (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 17 berkas bakal

calon); Partai Garuda (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 10 berkas bakal calon); Partai PBB (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 43 berkas bakal calon). Ditemukan 1 data ganda eksternal pada Partai Ummat dan Partai Garuda. Serta terdapat 1 data ganda internal beda kabupaten pada Partai PSI dan Partai Gelora.



Gambar 1.8 Tim verifikator melakukan vermin dokumen melalui SILON.

Pada tanggal 2 Juni 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 2 Juni 2023 yaitu antara lain Partai Buruh oleh kelompok I dan Partai PPP oleh kelompok V, sedangkan untuk partai politik lainnya telah terverifikasi oleh verifikator. Proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hasil verifikasi menunjukkan Partai Buruh (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 22 berkas bakal calon) dan Partai PPP (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 31 berkas bakal calon). Pelaksanaan vermin berakhir usai 18 partai politik telah terverifikasi berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk seluruhnya.

Pihak KPU Kabupaten Karanganyar mengadakan Klarifikasi terhadap berkas dokumen administratif bacalon guna mempertajam pemeriksaan berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Adapun pelaksanaan berkas dokumen tersebut dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2023. Bersamaan dengan kegiatan

klarifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membentuk tim pengawasan klarifikasi.

Pada tanggal 13 Juni 2023, dilakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Adapun detail dari proses pengawasan klarifikasi terbagi atas sebagai berikut:

- a. Pengawasan klarifikasi pertama dilaksanakan dengan tujuan instansi yaitu RSUD Kabupaten Karanganyar; Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil pengawasan di RSUD Kabupaten Karanganyar terkait Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama SAMINO dan SUKARNI dari Partai Gerindra sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa RSUD Kab Karanganyar yang menyatakan sehat/tidak sehat dinyatakan sehat dan dicoret pada waktu itu juga;
 2. Surat keterangan kesehatan NAPZA dari RSUD Kab Karanganyar dikategorikan positif atas ditemukan tanda-tanda penggunaan NAPZA.

Klarifikasi selanjutnya ke Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI terkait ijazah Paket C yang diklarifikasi tersebut bukan dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI melainkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.



Gambar 1.9 Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Karanganyar (13/07/2023)

Klarifikasi terhadap dokumen persyaratan dilanjutkan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terkait ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas atas nama Rochmad Abdulloh dari Partai Golkar dan benar adanya validitas ijazah tersebut.

- b. Pengawasan klarifikasi kedua dilakukan bertempat di LLDIKTI Wilayah VI Semarang. Adapun dokumen yang diklarifikasi yaitu ijazah program Diploma III yang dikeluarkan Akademi Peternakan Karanganyar atas nama Siti Komsiyah dari Partai Golkar yang mana berbentuk surat keterangan lulus. Setelah dikonfirmasi, ijazah tersebut adalah valid dan sah sesuai ketentuan.



Gambar 1.10 Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Semarang (13/07/2023)

- c. Pengawasan klarifikasi ketiga dilaksanakan di Surakarta. Pada kesempatan tersebut pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar didampingi staf bersama dengan tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Wilayah VII Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil pengawasan klarifikasi menunjukkan bahwa klarifikasi dokumen bertempat di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai surat keterangan dari PN Surakarta telah diperiksa dan

dinyatakan sesuai. Kemudian klarifikasi dokumen di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Wilayah VII mengenai data ijazah terkait salah penulisan ejaan nama yang harus disertai surat keterangan dari instansi di atasnya (yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan). Setelah dimintai keterangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta ternyata perlu dikonfirmasi ke provinsi terkait keabsahan ijazah tersebut.



Gambar 1.11 Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD berlokasi di Kota Surakarta (13/07/2023)

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang berpotensi tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

b. Saran Perbaikan

Hasil pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa tidak terdapat potensi dugaan pelanggaran dan temuan. Maka, tidak ada saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Sebagaimana hasil pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa

tidak terdapat temuan. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti rekomendasi.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pelaksanaan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berjalan lancar mulai dari pelaksanaan verifikasi hingga klarifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Sejauh pengawasan berjalan pada sub tahapan ini tidak menemui kendala yang amat signifikan. Satu kendala yang dihadapi yaitu pengawasan SILON yang terkendala rena terbatasnya akses SILON. Kami tidak bisa mengakses ataupun melihat dokumen persyaratan yang diupload di SILON, sehingga sulit melaksanakan pengawasan SILON.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berjalan lancar. Sejak awal perencanaan strategi pengawasan yang berfokus pada penyampaian surat imbauan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi, kemudian dijadwalkan pada tanggal 31 Mei s.d 2 Juni 2023. Dilanjutkan dengan klarifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada tanggal 13 Juni 2023. Pengawasan dilaksanakan secara melekat dan tidak menemui hambatan. Hanya saja dalam pelaksanaan pengawasan SILON pada sub tahapan verifikasi administrasi memang ditemui kendala perihal terbatasnya akses melihat dokumen asli yang telah diupload pada SILON yang berakibat pada tidak optimalnya pengawasan SILON.